



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun rencana kerja tahun 2026. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan rencana kerja, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan rencana kerja tahun 2026 sehingga tercapainya tujuan dan sasaran rencana strategis lebih optimal dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan rencana kerja tahun 2026.

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik


Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda

NIP 19730823 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.3. Analis Kinerja Pelayanan.....	16
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	20
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP.....	21
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 2.2	Realisasi Target Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024	8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024	10
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	19
Tabel 2.5	Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	22
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku.....	27
Tabel 2.7	Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 Yang Menjadi Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.....	34
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026.....	34
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Tahun 2026	36
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kepulauan Anambas	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Rencana kerja meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja adalah acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga Rencana Kerja tahun 2026 dapat menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2026 yang tertuang dalam Rencana Kerja pembangunan Pemerintah Daerah bertema **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”** dengan Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif;
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragam.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi ORMAS.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76).
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun adalah:

a. Maksud

1. Sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026
2. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026

b. Tujuan

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kesatuan bangsa dan politik yang mengarah pada pencapaian tujuan daerah;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026;

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan rumusan rencana kerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai selama tahun 2025 dan target tahun 2026 (tahun berjalan).

Dalam pelaksanaan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026, implementasi terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas juga menjadi “*concern*” tersendiri dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025, dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	19 Orang
2.	Perempuan	16 Orang
Jumlah		35 Orang

Dari tabel diatas, kondisi pegawai Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sejumlah 35 orang, yang terdiri dari 19 orang (54,29%) pegawai laki-laki dan 16 orang (45,71%) pegawai perempuan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 1 urusan, dengan 5 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.23.307.818.991,- atau sebesar 94,36% persen dari total anggaran sebesar Rp.24.701.288.767,-. Implementasi tingkat capaian sebesar 94,36% bisa diinterpretasikan memuaskan. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan masih keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Selanjutnya, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
Realisasi Target Fisik dan Keuangan
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Urusan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITI
Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Nilai Anggaran : 24,701,288,767

NO	SUB KEGIATAN	PAGU DANA DALAM DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			
				Rp.	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
I	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,150,888,985	20.85	4,179,035,894	91.04	16.92	206.14	19.73	-	971,853,091
1	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,558,880,012	14.41	3,076,732,050	166.11	12.46	183.33	14.29	-	482,147,962
1	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,387,160,012	13.71	2,940,572,050	86.82	11.90	100.00	13.71	-	446,587,962
2	8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171,720,000	0.70	136,160,000	79.29	0.55	83.33	0.58	-	35,560,000
2	8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16,428,000	0.07	13,690,000	83.33	0.06	91.67	0.06	-	2,738,000
3	8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,428,000	0.07	13,690,000	83.33	0.06	91.67	0.06	-	2,738,000
3	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	722,604,836	2.93	418,060,219	57.85	1.69	372.35	2.58	-	304,544,617
4	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,147,000	0.17	15,942,000	38.74	0.06	91.67	0.15	-	25,205,000
5	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,708,954	0.05	2,282,000	19.49	0.01	33.19	0.02	-	9,426,954
6	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127,658,882	0.52	33,124,500	25.95	0.13	80.83	0.42	-	94,534,382
7	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	27,530,000	0.11	3,070,000	11.15	0.01	75.00	0.08	-	24,460,000
8	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514,560,000	2.08	363,641,719	70.67	1.47	91.67	1.91	-	150,918,281
4	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300,410,990	1.22	174,669,600	58.14	0.71	108.33	0.75	-	125,741,390
9	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125,741,390	0.51	-	-	0.00	8.33	0.04	-	125,741,390
10	8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174,669,600	0.71	174,669,600	100.00	0.71	100.00	0.71	-	-
5	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	552,565,147	2.24	495,884,025	89.74	2.01	275.00	2.05	-	56,681,122
11	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,604,375	0.07	12,842,500	72.95	0.05	91.67	0.07	-	4,761,875
12	8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,395,490	0.28	56,840,000	81.91	0.23	91.67	0.26	-	12,555,490
13	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	465,565,282	1.88	426,201,525	91.54	1.73	91.67	1.73	-	39,363,757
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	72,528,840	0.29	-	-	0.00	0.05	0.00	-	72,528,840
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	72,528,840	0.29	-	-	0.00	0.05	0.00	-	72,528,840
14	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	72,528,840	0.29	-	-	0.00	0.05	0.00	-	72,528,840

NO	SUB KEGIATAN	PAGU DANA DALAM DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			
				Rp.	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18,256,934,442	73.91	18,035,234,187	98.79	73.01	189.01	73.37	-	221,700,255
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	18,256,934,442	73.91	18,035,234,187	98.79	73.01	189.01	73.37	-	221,700,255
15	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	17,030,963,975	68.95	17,030,963,975	100.00	68.95	100.00	68.95	-	-
16	8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1,225,970,487	4.96	1,004,270,212	81.92	4.07	89.01	4.42	-	221,700,255
IV	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200,000,000	0.81	200,000,000	100.00	0.81	100.00	0.81	-	-
8	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200,000,000	0.81	200,000,000	100.00	0.81	100.00	0.81	-	-
17	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200,000,000	0.81	200,000,000	100.00	0.81	100.00	0.81	-	-
v	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,020,936,500	4.13	893,548,910	87.52	3.62	190.65	3.94	-	127,387,590
9	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1,020,936,500	4.13	893,548,910	87.52	3.62	190.65	3.94	-	127,387,590
18	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500,000,000	2.02	500,000,000	100.00	2.02	100.00	2.02	-	-
19	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	520,936,500	2.11	393,548,910	75.55	1.59	90.65	1.91	-	127,387,590
	Jumlah	24,701,288,767	100.00	23,307,818,991	75.47	94.36	137.17	97.84	-	1,393,469,776

Tabel. 2. 3
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian enstra Sampai dengan Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2026 (Akhir Periode) (RENSTRA)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Sampai Dengan Tahun 2024		Catatan
					Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8											
8	1										
8	1	1									
8	1	1	2.01								
8	1	1	2.01	1							
8	1	1	2.01	2							
8	1	1	2.01	3							
8	1	1	2.01	4							
8	1	1	2.01	5							
8	1	1	2.01	6							
8	1	1	2.02								
8	1	1	2.02	01							

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	1	1	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100 Dokumen	57,14	12 Dokumen	9 Dokumen	75	3 Tunda Bayar
8	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	7 Paket	7 Paket	28 Paket	57,14	2 Paket	1 Paket	50	1 Paket Tunda Bayar
8	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	84 Paket	12 Paket	12 Paket	48 Paket	57,14	3 Paket	0 Paket	0	Tunda Bayar
8	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket	12 Paket	12 Paket	48 Paket	57,14	1 Paket	0 Paket	0	Tunda Bayar
8	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	6 Paket	50.00	1 Paket	1 Paket	100	
8	1	1	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	25 Laporan	25 Laporan	75 Laporan	50.00	25 Laporan	75 Laporan		
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0	5 unit	5 unit	20.00	5 unit	0 unit	0	Tunda Bayar
8	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100	
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	Nihil	Nihil		
8	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	12 Laporan	12 Laporan	100	
8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	2 Laporan	2 Laporan	100	
8	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	12 Laporan	12 Laporan	100	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100	
8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	77,00 (Baik)	90,74	76,75	76,75	99,67	77,75	87,30	112,28	
						Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok	10 Peraturan	N/A	3 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	1 Peraturan	0 Peraturan	Nihil	
						Jumlah kasus tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok	12 kasus	N/A	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	Nihil	

					Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok	10 kasus	0 Peraturan	2 Kasus	0 Peraturan		1 Kasus	0 Kasus	Nihil		
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
8	1	2	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	21 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	23,81	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
8	1	2	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
8	1	2	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 orang	-	50 Orang	50 Orang	25,00	374 Orang	374 Orang	100	
8	1	2	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 Orang	30 Oang	30 Oang	120 Orang	57,14	300 Orang	300 Orang	100	
8	1	2	2.01	05	Pelaksanaan Monitoing Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	25,00	4 Laporan	4 Laporan	100	
8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (Voters Turnout)	84%	NIHIL	80%	80%	95,84	80%	81%	101,25	
						Indeks kepuasan masyarakat dibidang poldagri	78,50 (BAIK)	90,74	77,50 (BAIK)	77,50 (BAIK)	98,73	77,75 (BAIK)	87,30 (BAIK)	112,28	
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	20 Kasus	0 Kasus	4 Kasus	0 Kasus	200	1 Kasus	0 Kasus	200	
						Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat	3 Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
						Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	2 Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
						Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	15%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
						Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	4 Kegiatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Persentase perempuan pengurus partai politik	25%	15%	18%	18%	72,00	6 Orang	3 Orang	50		
					Jumlah partai politik aktif yang mendapatkan kursi	10 Partai	10 Partai	10 Partai	10 Partai	100	11 Partai	11 Partai	100		

8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
8	1	3	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	840 Orang	20	200	240	28,57	85,5	100						116,95
8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	50,00	11 Laporan	11 Laporan						100
8	1	4				Indeks kepuasan masyarakat dibidangormas	79,00 (BAIK)	90,74	77,50(BAIK)	98,73	77,00	77,75(BAIK)	87,30						112,28
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	20 Kasus	0	4 Kasus	0	200	1 Kasus	0						200
						Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap	6 Ormas	0	1 Ormas	0	200	1 Ormas	0						200
						Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauanambas	8 Ormas	0	3 Ormas	0	0	30 Ormas	30 Ormas						100
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan														
8	1	4	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	170 Orang	30 Orang	30 Orang	80 Orang	47,06	30 Ormas	30 Ormas						100
8	1	4	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	14 Laporan	37,84	1 Laporan	1 Laporan						100
8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	77,50 (Baik)	90,74	76,69 (Baik)	83,33 (BAIK)	107,52	77,75 (Baik)	87,30 (BAIK)						112,28
						Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	6 aturan	0	1 aturan	0	200	1 aturan	1 aturan						100
						Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	5 kasus	0	2 kasus	0	200	Nihil	Nihil						Nihil

						Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	5 kasus	0	2 kasus	0	200	1 kasus	0	200		
						Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	1225	147	-	147	12,00	300 Orang	300 Orang	100		
						Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	25 kali	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
						Jumlah laporan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	30 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	16,67	2 laporan	2 laporan	100		
						Jumlah koordinasi/ komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	32 kali	2 kali	2 kali	2 kali	6,25	2 kali	2 kali	100		
						Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yang terbentuk	1 tim/ forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugus tugas	100	Nihil	Nihil	Nihil		
						Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat	5 kali	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
						Jumlah kegiatan RAN P4GN	5 kali	2	Nihil	2	40,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100		
8	1	5	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8	1	5	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	41 Dokumen	4 Dokumen	9 Dokumen	13 Dokumen	31,71	2 Dokumen	2 Dokumen	100		
8	1	5	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Nihil	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100		
8	1	5	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	174 Orang	29 Orang	29 Orang	87 Orang	25,00	374 Orang	374 Orang	100		
8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	217 Orang	31 Orang	31 Orang	124 Orang	57,14	4 Kali	4 Kali	100		
8	1	5	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	40,00	4 Laporan	4 Laporan	100		
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial di daerah	85%	80%	80%	80%	94,12	100%	80%	80		

8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah fasilitas pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dinidn penanganan konflik di daerah	60 Rapat	10 Rapat	10 Rapat	30 Rapat	50,00	4 Rapat	4 Rapat	100	
8	1	6	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
8	1	6	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
8	1	6	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	0	20 Orang	20 Orang	20,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100	
8	1	6	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	20 Orang	20 Orang	60 Orang	50,00	20 Orang	20 Orang	100	
8	1	6	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2190 Laporan Harian	365 Laporan Harian	365 Laporan Harian	1095 Laporan Harian	50,00	365 Laporan Harian	365 Laporan Harian	100	
8	1	6	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 bertujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas Indikator adalah **Nilai Reformasi Birokrasi** adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh komponen pengungkit yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) area perubahan yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penguatan Sistem Pengawasan;
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 4) Penguatan Kelembagaan;
 - 5) Penguatan Tatalaksana;
 - 6) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - 7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun indikator yang menunjang reformasi birokrasi adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi SAKIP perangkat daerah dilaksanakan oleh Inspektorat dan dituangkan kedalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diberikan kepada Bakesbangpol setiap tahunnya. Dari LHE dapat diketahui nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 dengan nilai 64,80

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengumpulan data survei ini dilakukan dengan cara pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan stakeholder atau penerima layanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun hasil dari SKM adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai IKM merupakan nilai rata-rata dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai menggunakan Skala Likert (1-4) kemudian dikalikan dengan nilai 25 (dua puluh lima).

Adapun unsur pelayanan yang menjadi indikator untuk mendapatkan nilai IKM adalah :

- 1) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak

lanjut.

- 9) Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Selanjutnya pada tahun 2024 berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan politik memperoleh skor 87,30.

2. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa yaitu dengan sasaran :

a. Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi. Pelanggaran Demokrasi adalah berbagai macam kebijakan atau tindakan acaman/kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau masyarakat terhadap kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat. Adapun Indikator Pelanggaran Demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat;
- 2) Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat;
- 3) Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih;
- 4) Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
- 5) Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama;
- 6) Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama;
- 7) Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama;
- 8) Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok;
- 9) Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat yang

- diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok;
- 10) Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok.
- b. Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik merupakan bentuk kegiatan sosialisasi dan seminar yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lintas instansi maupun instansi vertikal yang mengundang pejabat dari Bakesbangpol sebagai narasumber. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia.

Selanjutnya Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 sebagaimana dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 adalah sebagaimana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	SPM	IK K	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Rasio 2024	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1.	Nilai SAKIP			62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	77,00	52,79	64,80	67,30	64,80	90,00	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat			76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)	78,00 (Baik)	83,56	90,74	90,74	87,30	112,28	
3.	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi			4 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0	0	0	0	200	
4.	Jumlah aparatur da masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini			278 Orang	300 Orang	302 Orang	314 Orang	326 Orang	326 Orang	519 orang	363 orang	289 orang	843 orang	268,47	

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Bahwa bangsa yang dibangun diatas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan konflik sosial, budaya dan politik di daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya diantaranya kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang hukum. Hal ini merupakan hambatan yang berarti bagi terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping itu fenomena faktual terhadap kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta rasa toleransi sehingga berpengaruh pada faktor ancaman terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Memperhatikan situasi yang berkembang pada dewasa ini di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dikemukakan beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila;
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi;
3. Pengaruh budaya asing dan radikalisme;
4. Belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat;
5. Pengelolaan organisasi masyarakat yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas politik;
7. Masih minimnya sistem cegah dan deteksi dini konflik;
8. Kurang maksimalnya kapasitas penanganan konflik;
9. Meningkatnya ancaman dari isu sektarian dan primordialisme;

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 merupakan langkah awal dalam perencanaan tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta porsi anggaran tersedia pada tahun rencana. Selanjutnya RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 yang berisi program dan kegiatan nomenklatur baru sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada tahun 2026 program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menitikberatkan pada tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi pendidikan politik masyarakat, ideologi, sosial, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik secara berkelanjutan. Pada Rencana Kerja Tahun 2026 akan di sinkronisasi dengan Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2026.

Berikut ini tabel reviu Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Tabel 2.5
Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA					HASIL KEBUTUHAN ANALISIS			
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	IINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	IINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2		4	5	1	2	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		KKA						
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah		90%	4.727.224.385	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	92%	4.839.451.814
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	1.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100%	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	-
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	500.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	500.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		12 Data	500.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan sesuai ketentuan		100%	16.428.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	16.428.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	16.428.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	16.428.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah		100%	4.206.637.170	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100%	4.272.320.676
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	4.125.172.341	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4.188.800.676
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	81.464.830	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	83.520.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran		100%	149.282.966	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran	100%	149.282.966

Rencana Kerja (RENJA) 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	20.756.006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.756.006
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	5.329.472	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.329.472
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	21.930.484	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.930.484
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	6.785.004	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.785.004
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	94.482.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	94.482.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan		70%	327.426.249	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	70%	373.970.172
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 Unit	75.630.452	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	107.922.532
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	51.942.997	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	66.194.840
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	199.852.800	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	199.852.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		80%	24.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	80%	24.250.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	4.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.250.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak/Perizinannya		6 Unit	2.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak/Perizinannya	6 Unit	2.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	2.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.200.000
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	1.214.450.701	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.465.058.156

Rencana Kerja (RENJA) 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		58 Orang	1.214.450.701	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	58 Orang	1.465.058.156
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	80.000.000
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		26 Orang	1.114.450.701	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	26 Orang	1.385.058.156
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		100%	130.185.710	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%	110.185.710
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelak sanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		31 Orang	130.185.710	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelak sanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	31 Orang	110.185.710
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	30.185.710	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	30.185.710
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Peng hayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		31 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Peng hayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31 Orang	80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik		85%	460.363.589	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	87%	460.363.589

Rencana Kerja (RENJA) 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		330 Orang	460.363.589	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	330 Orang	460.363.589
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman tauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		330 Orang	450.363.589	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman auan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	330 Orang	450.363.589
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	10.000.000
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		-	-	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		81,58%	10.000.000	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	84,21%	20.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		1 Laporan	10.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 Laporan	20.000.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		85%	241.000.000	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	87%	675.795.200

Rencana Kerja (RENJA) 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		42 Orang	241.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	42 Orang	675.795.200
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		9 orang	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 orang	-
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		33 Orang	1.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33 Orang	175.803.400
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Kali	240.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kali	499.991.800

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tidak terdapat usulan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut tabel penelaahan usulan program dan kegiatan sebagai berikut berikut.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Ada Usulan				

Sebagai bahan informasi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesekretariatan

Melalui sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk:

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pemeliharaannya
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur
- Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Melalui bidang ini mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

- Memantapkan wawasan kebangsaan masyarakat yang menopang kokohnya integrasi nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memantapkan pembauran bangsa, kerukunan umat beragama disegala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatkan kesadaran Bela Negara segenap warga masyarakat;
- Memfungsikan forum yang dibentuk oleh perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Melalui bidang ini mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

- Mengembangkan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik, mantapnya interaksi politik antar infrastruktur dan suprastruktur politik, serta semakin demokratisnya sikap dan perilaku masyarakat melalui Pendidikan politik;
- Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat, yang dilandasi mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral yang tertuang dalam 4 Pilar Kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika).
- Melalui program dan kegiatan yang di usulkan :
 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Intelijen

Melalui bidang ini mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

- Mendeteksi dan menganalisis gejala dini terjadinya konflik yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat
- Meningkatkan kerjasama intelkam
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) serta terhadap berbagai gejala konflik yang akan timbul

- Mengatasi berbagai konflik sektarian dan konflik sosial dalam masyarakat yang dilandasi dengan kajian strategis yang komprehensif guna memecahkan permasalahan aktual daerah dan bangsa
- Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut, yaitu:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri (2 indikator);
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (4 indikator);
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (1 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan

- politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama,
 6. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
 7. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029, bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visi, yaitu : **“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”** dengan Misi menjadi urusan dan kewenangan Badan Kesatuan dan Politik, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif.

Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Politik periode 2026- 2029 dengan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025-2029
Yang Menjadi Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VISI dan MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera								
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur								
	T1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata	Indeks Pembangunan Manusia	73,86	74,26	74,65	75,05	75,44	75,83
	S1 Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99
MISI III : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif								
	T2 Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratik	Indeks Reformasi Refomasi	BB (74,57)	BB (74,90)	BB (75,15)	BB (75,48)	BB (75,77)	BB (76)
	Terwujudnya Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	B (63,66)	B (65,34)	B (67,05)	B (68,72)	BB (70,46)	BB (71,86)

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Menujukkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Prediket AKIP	B	B	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	76,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)	77,90 (Baik)
2	Meningkatnya Stabilitas sosial dan Kehidupan beragama yang rukun		Indeks Kerukunan umat beragama	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99
		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65,00	65,00	65,00	67,50	67,50	67,50

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2025-2029 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Menujukkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Prediket AKIP	Prediket	B
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	Nilai	67,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,82 (Baik)
Meningkatnya Stabilitas sosial dan Kehidupan beragama yang rukun		Indeks Kerukunan umat beragama	Nilai	90,2
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	65,00

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan selanjutnya menyesuaikan porsi anggaran yang tersedia dengan program dan kegiatan prioritas yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Dengan tersusunnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra PD yang terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE REKENING						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	IINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI
Menujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Prediket AKIP	8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KKA	
		Nilai AKIP							Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	8	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	
			8	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			8	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			8	01	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			8	01	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
			8	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan sesuai ketentuan	
			8	01	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	
			8	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			8	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			8	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			8	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran	
			8	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			8	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
			8	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
			8	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	

			8	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			8	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	
			8	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
			8	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
			8	01	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
			8	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
			8	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	
			8	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			8	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
			8	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			8	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
			8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak/Perizinannya	
			8	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
			8	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
Meningkatnya Stabilitas sosial dan Kehidupan beragama yang rukun		Indeks Kerukunan umat beragama	8	01	02				PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia							Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	
			8	01	02	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8	01	02	2	01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	
			8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		

									Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	
			8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
			8	01	05	2	01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	
			8	01	05	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
									Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	
			8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8	01	03	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8	01	03	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
									Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	
			8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		

									Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	
			8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
			8	01	04	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
									Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	
			8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8	01	06	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8	01	06	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8	01	06	2	01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Dalam Negeri 2020-2024.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	IINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2026		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
									TARGET	PAGU INDIKATIF		TARGET	PAGU INDIKATIF
8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		KKA					
						Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah		90%	4.839.451.814			4.799.811.794
8	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	1.000.000		100%	5.000.000
8	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	-		1 Dokumen	1.500.000
8	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	-		1 Dokumen	1.500.000
8	01	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	500.000		1 Dokumen	1.000.000
8	01	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		12 Data	500.000		12 Data	1.000.000
8	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan sesuai ketentuan		100%	16.428.000		100%	16.428.000
8	01	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	16.428.000		12 Laporan	16.428.000
8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah		100%	4.272.320.676		100%	4.304.984.064
8	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	4.188.800.676		14 Bulan	4.166.424.064
8	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	83.520.000		12 Bulan	136.560.000

Rencana Kerja (RENJA) 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000
8	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran	100%	149.282.966	100%	349.149.730
8	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.756.006	5 Paket	64.000.000
8	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.329.472	3 Paket	10.399.730
8	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.930.484	5 Paket	66.000.000
8	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.785.004	1 Paket	20.000.000
8	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	94.482.000	2 Laporan	188.750.000
8	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	70%	373.970.172	80%	74.000.000
8	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	107.922.532	1 Unit	59.000.000
8	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	66.194.840	1 Unit	15.000.000
8	01	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-
8	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	199.852.800		
8	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	80%	24.250.000	80%	10.250.000
8	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-
8	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	6.000.000
8	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.250.000	12 Laporan	4.250.000
8	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	0%	-
8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak/Perizinannya	6 Unit	2.200.000	21 Unit	40.000.000
8	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	-	7 Unit	20.000.000
8	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.200.000	14 Unit	20.000.000
8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
						Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.465.058.156	100%	1.275.927.223

8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		58 Orang	1.465.058.156		58 Orang	1.275.927.223
8	01	02	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30 Orang	80.000.000		30 Orang	100.000.000
8	01	02	2	01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		26 Orang	1.385.058.156		26 Orang	1.175.927.223
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
						Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		100%	110.185.710		100%	140.000.000
8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		31 Orang	110.185.710		31 Orang	140.000.000
8	01	05	2	01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	30.185.710		1 Dokumen	40.000.000
8	01	05	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		31 Orang	80.000.000		31 Orang	100.000.000
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
						Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik		85%	460.363.589		87%	470.363.590
8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		330 Orang	460.363.589		330 Orang	470.363.590
8	01	03	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		330 Orang	450.363.589		330 Orang	450.363.590

Rencana Kerja (RENJA) 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	01	03	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2 Laporan	10.000.000		2 Laporan	20.000.000
						Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		-	-			
8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
						Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		81,58%	20.000.000		84,21%	44.636.411
8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		1 Laporan	20.000.000		1 Laporan	44.636.411
8	01	04	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	20.000.000		1 Laporan	44.636.411
8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
						Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		85%	675.795.200		87%	380.000.000
8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		42 Orang	675.795.200		42 Orang	380.000.000
8	01	06	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		9 orang	-		9 orang	60.000.000
8	01	06	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		33 Orang	175.803.400		33 Orang	80.000.000
8	01	06	2	01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Kali	499.991.800		1 Kali	240.000.000
JUMLAH										7.570.854.469			7.110.739.018

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun merupakan langkah awal rencana kerja tahun 2026 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengacu RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, semoga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik



Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda
NIP 19730823 200312 1 004